

BAB IV

KERJASAMA INDONESIA DALAM MENJALANKAN MANDAT CTI-CFF

Setelah pada bab sebelumnya penulis telah membahas mengenai isu perairan terutama isu ekosistem laut yang terancam hingga terbentuknya CTI CFF sebagai cara negara kawasan anggota CT6 (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, serta Timor Leste) menangani masalah tersebut, hingga pemberian mandat kepada seluruh negara anggota CTI CFF yang tertuang dalam RPOA dan diadopsi di masing-masing NPOA tiap negara. Oleh karena itu, pada bab ini penulis akan membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh CTI CFF dengan melakukan kerjasama dengan negara anggota (signatories), negara mitra dan juga beberapa aktor lainnya seperti LSM.

Indonesia sebagai negara yang peduli dengan isu lingkungan, dan memiliki kekayaan laut yang begitu melimpah melihat kerusakan laut yang telah banyak terjadi di beberapa sektor dan wilayah yang ada. Dengan melihat hal tersebut, tentunya sebagai salah satu negara dengan luas wilayah perairan dan kekayaan laut yang melimpah di kawasan segitiga terumbu karang dunia, pantas sewajarnya Indonesia mengajak serta negara kawasan terumbu karang dan mitra serta khalayak luas untuk bersama-sama melindungi ekosistem laut dari berbagai macam ancaman yang terjadi. *Coral Triangle Initiatives* (CTI) dikembangkan untuk membentuk sebuah mekanisme kerjasama antar negara-negara yang memiliki tujuan serta cara pandang yang sama mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mempertahankan kesinambungan Sumber Daya Alam (SDA) berupa sumberdaya laut di kawasan Segitiga Terumbu Karang Dunia yang mencakup enam negara kawasan segitiga terumbu karang dunia (Indonesia, 2010). Dalam hal ini, kerjasama antar enam negara anggota CTI CFF dan negara mitra lainnya terus dikembangkan dengan melihat target RPOA yang diterapkan oleh CTI CFF dimana telah diturunkan pada *National Plan on*

Action (NPOA) tiap negara. Peran Indonesia tentunya menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan negara penggagas dan negara dengan kekayaan laut yang paling besar di antara negara-negara lainnya.

Hasil dari wawancara penulis dengan *National Coordinating Committee* (NCC) Indonesia (Tomy Ganda Pratama, 2018) sebagai contoh pelaksanaan program CTI-CFF di Indonesia sesuai dengan NPOA yang tujuan dan sasaran telah dikembangkan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP) yang terkait dengan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan. Untuk melanjutkan program-program tersebut, NPOA perlu ditinjau dan dikembangkan secara menyeluruh untuk menghasilkan *outcome* yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi telah dihasilkan. NPOA meliputi tata letak, struktur dan target yang ditetapkan dalam RPOA. Seperti halnya RPOA, NPOA terdiri dari dua bagian, pertama mencakup komitmen menyeluruh khususnya untuk posisi dan kondisi Indonesia, dan kedua menjabarkan komitmen khususnya terkait dengan kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mencapai target yang disepakati dalam RPOA tersebut.

Pada tingkat nasional, NCC telah memimpin upaya sukses dalam mengidentifikasi prioritas kawasan laut; penyelesaian peraturan zonasi untuk peralatan memancing yang mendukung perikanan berkelanjutan; menunjuk taman laut seluas 1,2 juta hektar sebagai kawasan lindung; melakukan kampanye informasi masyarakat tentang perubahan iklim; pengembangan sekolah untuk konservasi laut dan pelembagaan kurikulum pelatihan kawasan lindung laut. Dalam bab ini, penulis ingin memaparkan secara teoritik berbagai kegiatan kerjasama yang telah pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah NCC Indonesia lakukan dalam melaksanakan mandat yang diperintahkan oleh CTI CFF, dari kerjasama dengan negara anggota, negara mitra serta beberapa *Non-governmental Organization* (NGO) dan kelompok kepentingan lainnya.

Secara rinci penulis akan berusaha memberikan eksplanasi untuk menjelaskan keterkaitan jalur pada diplomasi multi jalur yang penulis gunakan sebagai identifikasi pola diplomasi yang dilakukan. Pada skripsi ini penulis menggunakan konsep “*Multy Track Diplomacy*” dari John W. McDonald sebagai konsep tunggal untuk menjelaskan, menganalisa, serta menjawab terkait dengan kerjasama yang dilakukan. Teori tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian hipotesa yang sudah terlebih dahulu diajukan pada bab pertama. “Diplomasi Multi Jalur/ *Multy track Diplomacy*” John W. McDonald menjadi landasan penulis dalam menganalisa diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan kerjasamanya. Dari kesembilan jalur yang dikemukakan John W. McDonald, penulis hanya akan membuktikan empat jalur. Jalur pertama yakni *Government*, trek keempat *Private citizen*, serta jalur kelima *research, training and education*.

A. Kerjasama Indonesia dengan Negara

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Indonesia bekerjasama dengan negara, baik itu negara *signatories*/ negara anggota maupun negara mitra. Dalam sub bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dengan negara anggota CTI CFF. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa ada enam negara yang terletak di kawasan segitiga terumbu karang dunia, yakni Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, serta Timor Leste. Dari keenam negara tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk melestarikan kawasan yang merupakan kawasan perlindungan, rumah bagi banyak spesies ikan tangkap. Tiap negara anggota memiliki *interest* yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama terhadap lingkungan di kawasan tersebut.

Dengan adanya kerjasama dari anggota, diarpkan nantinya kawasan tersebut menjadi rumah bagi spesies biota laut yang lestari dan memberikan dampak positif bagi isu perairan, terutama laut dunia. Berikut penjelasan mengenai kerjasama Indonesia dengan negara *signatories*.

1. Negara Signatories

Sistem Kawasan Konservasi Perairan Laut Segitiga Terumbu Karang/*Coral Triangle Marine Protected Area System (CTMPAs)*. Ini dilakukan sebagai upaya menciptakan pengelolaan dan perlindungan kawasan laut dan pesisir yang lebih baik. Indonesia sebagai pemrakarsa serta pemilik kawasan terluas tentunya memiliki peran sangat signifikan untuk memberikan contoh bagaimana konteks pengelolaan kawasan regional dimulai dari kebijakan penataan ruang yang komprehensif di masing-masing negara anggotanya. Kebijakan tata ruang Indonesia harus bisa menyediakan dasar bagi identifikasi serta analisis berbagai faktor ekologi, ekonomi, sosial dan politik dalam penetapan tata ruang terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Target pelaksanaan dan fungsional CTMPAS secara penuh dicanangkan pada tahun 2020 di seluruh negara anggota CTI-CFF (JawaTimur, 2014). Sehingga, kerangka kerja dan rencana aksi CTMPAS menjadi sangat penting untuk segera diadopsi dan diimplementasikan oleh masing-masing negara anggota CTI-CFF, khususnya dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Dengan melihat diplomasi multi trek pada trek pertama yaitu diplomasi yang dilakukan oleh *government to government* (G to G). Pembuatan kebijakan dan pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui aspek-aspek proses formal pemerintahan. Indonesia menerapkan pendekatan ekosistem dan pengelolaan bersama untuk perikanan yang berkelanjutan dan penguatan jejaring *Coral Triangle Marine Protected Areas (CTMPAs)* untuk melindungi ikan tuna, ikan karang dan ikan ekonomis penting lainnya pada masa/proses pemijahan di kawasan daerah perlindungan laut (*marine protected area/MPA*) serta mengembangkan kapasitas konservasi sumber daya laut, perlindungan dan pelestarian sumber-sumber

perikanan yang bermigrasi secara lintas batas negara (Tomy Ganda Pratama, 2018). Dengan hal ini, Indonesia mendukung pengembangan ikan tangkap yang dibutuhkan dalam proses ekspor impor dan sebagai kebutuhan pangan dari negara lainnya.

Selain itu, upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif adalah dengan mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). CTI-CFF Indonesia memiliki target pengelolaan yang efektif dari 10 Kawasan Konservasi Laut nasional dan 13 Kawasan Konservasi Laut kabupaten dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada terumbu karang dan ekosistem terkait; perluasan kawasan hingga mencapai 20.000.000 Ha kawasan konservasi kawasan (Sigit, 2013).

2. Negara Mitra

Seperti halnya kerjasama dengan negara anggota/*signatories*, negara mitra juga ikut andil dalam melaksanakan kerjasama dengan Indonesia untuk menyelamatkan lingkungan yang ada. Negara mitra yang dimaksud merupakan negara yang juga merupakan negara mitra dari CTI CFF maupun mitra Indonesia yang mempunyai kesamaan tujuan. Kerjasama dengan negara mitra dapat meliputi kerja sama dalam bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi dan lain sebagainya yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.

Hal ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat kedua negara, ikut andil dalam berbagai isu internasional dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Negara mitra dapat berasal dari negara yang memiliki kesamaan tujuan, memiliki letak geografis yang dekat, maupun negara yang memang memiliki kesamaan isu yang diangkat. Berikut kami akan menjelaskan tiga negara mitra yang bekerjasama dengan Indonesia terkait isu perairan tersebut, yakni Amerika, Australia dan Norwegia.

a. Pemerintah Australia

Indonesia dan Australia menyadari pentingnya kerjasama dalam mencegah, memberantas, dan menghapuskan penangkapan ikan yang tidak legal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) antara kedua negara dan di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara meliputi bidang perikanan. Kedua negara merasa puas dengan kemajuan terkini kerjasama di bidang pengawasan perikanan dan tanggap kegiatan melalui Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IASF), dan lebih jauh lagi melalui Rencana Aksi Regional Untuk Mempromosikan Praktek-praktek Penangkapan Ikan Bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di Kawasan pimpinan Indonesia-Australia. Kedua negara juga menyadari bahwa IUU Fishing adalah ancaman besar bagi ketahanan pangan di kawasan Asia-Pasifik, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Paracas dari *The 3rd Asia-Pacific Economic Cooperation Ocean Related Ministerial Meeting*, 11-12 Oktober 2010 di Paracas, Peru, dan berkomitmen untuk mendorong sebanyak mungkin aplikasi pada Konvensi PBB Melawan Kejahatan Lintas Batas Untuk Memerangi IUU Fishing. Dalam hal ini, kerjasama Indonesia dengan Australia merupakan perwujudan dari mandat berupa kerjasama regional yang diberikan oleh CTI-CFF yang tertuang dalam NPOA Indonesia goal kedua. Dalam komitmen inilah, lantas menjadi sebuah diplomasi antar kedua negara pada bidang pemberantasan praktik illegal fishing.

Tidak hanya itu saja, kedua negara menyadari pentingnya sumber daya kelautan bagi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Australia menghargai kepemimpinan Indonesia pada Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF), serta pada Deklarasi Laut Manado 2009 dalam kerangka Konferensi Kelautan Dunia, yang disepakati untuk mempercepat pembahasan mengenai lautan dan perubahan iklim. Indonesia menyambut baik komitmen Australia lebih lanjut untuk mendukung Coral Triangle Initiatives sebagai suatu kemitraan dalam menjaga sumber daya pesisir dan kelautan di kawasan. Hal ini pun juga merujuk pada mandat dari CTI berupa kerjasama regional yang diterapkan dalam NPOA Indonesia goal nomor tiga pada bidang proteksi wilayah perairan.

b. Pemerintah Amerika

Indonesia memiliki ekosistem keanekaragaman hayati, hutan tropis, dan laut tertinggi di dunia. Sekarang negara kepulauan ini menghadapi berbagai ancaman lingkungan yang serius mulai dari kerusakan hutan yang cepat dan pengambilan ikan berlebihan serta kejadian cuaca ekstrem. Amerika Serikat dan Indonesia bermitra untuk ketahanan lingkungan sehingga dapat langsung mengatasi tantangan tersebut. Komitmen yang kuat ini tercermin di AS-Indonesia Kemitraan Strategis yang telah disepakati pada tahun 2015 oleh kedua negara. Badan Pembangunan Internasional AS (*United States Agency for International Development /USAID*) bermitra untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dan memerangi ancaman global dan meningkatkan ketahanan iklim serta memajukan keamanan dan kesejahteraan AS. USAID mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk memajukan

ketahanan iklim dan membangun ketangguhan terhadap kejadian cuaca ekstrim dan bencana alam.



Gambar 4.1 Seorang asisten peneliti dari Indonesia sedang memperkuat tempat penanaman bibit lamun grass di lepas pantai Makassar. Lamun adalah bagian penting dari ekosistem laut yang memiliki dampak langsung ke air dan kehidupan laut. Sumber: USAID

Dalam hal ini, USAID memiliki tiga fokus dalam bekerjasama dengan pemerintah Indonesia antaranya: USAID mendukung manajemen berkelanjutan di tiga belas juta hektar hutan, yang hampir sama luasnya dengan negara bagian Tennessee. Kemudian, USAID menginginkan pembangunana 22MW energi dari 14 pembangkit energi bersih skala kecil yang didukung oleh USAID memasok energi untuk 200.000 orang. Dan yang terakhir, USAID membantu Indonesia melindungi dan mengelola 20 juta hektar sumber

daya laut dan pesisir – luasnya hampir sama dengan negara bagian South Dakota.

Program yang di jalankan antara Indonesia dengan USAID antaranya pada program pendidikan, di bidang Pendidikan Tinggi dan Kemitraan Universitas, *United States Agency for International Development* (USAID) mempromosikan kerjasama antara perguruan tinggi di AS dan Indonesia untuk membangun lingkungan yang mendukung riset kelas dunia untuk menghasilkan data baru yang berharga di berbagai bidang yang menjadi fokus bersama dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. USAID membangun kapasitas teknis perguruan tinggi di Indonesia untuk mengatasi tantangan utama pembangunan termasuk jaminan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesiapsiagaan bencana. Program USAID untuk kemitraan dalam penelitian (PEER - *Partnerships for Enhanced Engagement in Research*) merupakan bagian dari inisiatif global yang menghubungkan ilmuwan Indonesia yang mendapatkan dana dari USAID dengan ilmuwan AS yang didanai lembaga teknis pemerintah AS sehingga meningkatkan manfaat dari investasi yang dilakukan lembaga teknis pemerintah AS lainnya dalam penelitian dan pelatihan ilmiah. Lebih dari 40 kemitraan mempelajari berbagai subyek penelitian penting, termasuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Program lainnya yaitu program beasiswa Program beasiswa, USAID memberikan kesempatan kepada cendekiawan muda Indonesia untuk meraih gelar pascasarjana di AS dan Indonesia. Para penerima beasiswa yang mendapat dukungan dari USAID adalah pemimpin masa depan dan mempelajari bidang hukum, ekonomi, kebijakan publik, ilmu politik, administrasi publik,

lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Para penerima beasiswa mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan global dan membantu memajukan Indonesia sebagai negara yang sejahtera, demokratis dan memberikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyatnya. Sejak akhir tahun 50an, lebih dari 4.000 warga negara Indonesia telah menerima beasiswa dari USAID untuk belajar di universitas AS dan Indonesia dan puluhan ribu lainnya telah mengikuti program pelatihan jangka pendek.

Kemudian pada program bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi, dan Kemitraan Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kemitraan, kemajuan pembangunan menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan lebih berkelanjutan. Sebagian besar dari portofolio pendidikan USAID berfokus pada perluasan kerjasama penelitian antar universitas, meningkatkan kemampuan Indonesia untuk berkontribusi terhadap wacana ilmiah global, dan meningkatkan kualitas, ketersediaan serta kebutuhan data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan penyusunan kebijakan. Selain itu, USAID bekerja sama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk membangun kapasitas institusi dalam mengelola Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, mekanisme pembiayaan independen tingkat nasional untuk mendukung penelitian ilmiah berbasis prestasi.

c. Pemerintah Norwegia

Kerjasama Indonesia-Norwegia dimulai pada tahun 2015 dengan menitikberatkan pada tiga sektor yakni perdagangan dan investasi, maritime dan perikanan, serta bidang lingkungan. Dalam bidang maritim, kedua negara sepakat untuk

meningkatkan kerjasama di bidang maritim termasuk dalam upaya menanggulangi penangkapan ikan ilegal dan peningkatan kapasitas dalam perikanan dan budidaya laut. Sedangkan di bidang penanggulangan perubahan iklim, Norwegia dan Indonesia berusaha meningkatkan kerjasama dalam program pengurangan emisi PBB, REDD +.

Norwegia sudah membantu Indonesia dalam proses investigasi beberapa kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing dan memberikan pelatihan petugas pajak untuk meningkatkan pemasukan negara dalam industri perikanan. Indonesia dan Norwegia bersama-sama juga telah melakukan kampanye global terkait kejahatan transnasional terorganisir pada industri perikanan (*transnational organized crime in the fishing industry*) untuk meningkatkan kesadaran negara-negara akan pentingnya pemberantasan kejahatan di bidang perikanan. Selain itu, Indonesia-Norwegia juga telah membentuk *Global Expert Panel Group* untuk Kejahatan Perikanan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi kejahatan di bidang perikanan, pada pertemuan di Wina, Austria.

B. Kerjasama Indonesia dengan Non-Negara

Mitra CTI-CFF yang tercantum di sini adalah organisasi pembangunan dan non-pemerintah yang mendukung Sekretariat Regional CTI-CFF dan Komite Koordinasi Nasional CTI dalam mencapai tujuan yang ditentukan oleh Rencana Aksi Regional CTI. Para mitra mendukung CTI-CFF dengan memberikan keahlian teknis dan ilmiah; pendanaan untuk proyek dan kegiatan konservasi prioritas dan keberlanjutan di tingkat regional, nasional dan masyarakat; persiapan laporan dan studi; serta dukungan komunikasi untuk meningkatkan

kesadaran publik tentang Segitiga Karang dan CTI-CFF (Secretariat, 2009).

Dengan menerapkan National Program on Action (NPOA), NCC Indonesia lantas bekerjasama dengan beberapa Non-Governmental Organization (NGO) seperti WWF, *Conservation International* (CI) serta *The Nature Conservancy* (TNC). Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh NCC Indonesia dengan NGO partner diantaranya, pengembangan Kawasan konservasi Perairan (KKP) / *Marine Protected Area* (MPA) dengan nama *The Coastal Fisheries Initiative* (CFI) *Programme*, dengan berfokus pada tiga hal penting yakni memperkuat kebijakan sektor perikanan, kerangka hukum dan peraturan untuk memasukkan pertimbangan keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi; meningkatkan kapasitas dan kemampuan negara-negara nelayan, badan pengelolaan daerah dan memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan; dan mempromosikan kemitraan publik-swasta yang memungkinkan investasi di sepanjang rantai pasokan perikanan dengan mendorong perikanan berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan.

Program CFI ini merupakan program kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Conservation International*, dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). Hal tersebut tentu saja membantu pencapaian tujuan dari mandat yang diberikan oleh CTI-CFF pada bidang konservasi lingkungan dan pengembangan kawasan konservasi Laut. Tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan NCC Indonesia beserta partner NGOnya, memberikan dampak jangka panjang bagi kelangsungan hidup ekosistem laut dan mahluk yang hidup didalamnya. Tidak hanya sebatas kerjasama dalam penyelamatan ekosistem laut, NCC Indonesia beserta partner NGO-nya dalam CFI berfokus pada bidang pendidikan. Dimana dalam hal ini program yang dicanangkan berupa *the CFI Indonesia Child Project*. Sehingga diharapkan akan mengurangi tingkat pendidikan rendah pada masyarakat kawasan pesisir.

Tabel 4.1
Kerjasama NGO dan Mitra menurut data *National Coordinating Committee* (NCC) Indonesia
 (Tomy Ganda Pratama, 2018).

No	Mitra Kerja	Lokasi Kerja	Kegiatan	Target Waktu
1.	GIZ (<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>)	Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, Berau, Sebatik, Tarakan, (Minahasa – supporting)	Pelatihan EAFM & SK3, Pelatihan Jejaring KKP, Pelatihan MPA101 Berau, Pelatihan Satelit Telemetric & Tagging Penyu	2012-2017
2.	ADB-RETA	Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, Gorontalo District – Subdistrict Kwandang, Arakan Village, Para Island, Jakarta	Strategic Plan & EAFM, KKP Baru, Adaptasi Perubahan Iklim	-
3.	WWF- Indonesia	Jejaring KKP di BHS-Sulu Sulawesi-Sunda Banda, KKP Baru di Lesser Sunda dan Inner Banda, Selat Pantar (Alor), Flores Timur, Komodo (Manggarai), Southern-Eastern Sulawesi Seascape, Wakatobi, Taka Bonerate, KKPD Sultra, SESS-Muna,	Kawasan Konservasi Perairan, Perlindungan Spesies Penting, Perikanan Berkelanjutan, Wisata Bahari	2014-2018

4.	CI (<i>Conservation International</i>)	Bentang Laut Kepala Burung, Raja Ampat, Kaimana, Bali	Jejaring KKP, Karbon Biru, Konservasi Pari Manta & hiu Paus, Pelatihan	2015-2020
5.	USAID-SEA Project	WPP-715, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat	RZWP3K, Perikanan (EAFM), Kawasan Konservasi, Penguatan Kebijakan & Perundangan, Pelatihan	2016-2021
6.	CTC	Bentang Laut Sunda-Banda, WPP-715, Laut Jawa, BP3 Ambon, BP3 Aertembaga, BP3 Banyuwangi, BP3 Tegal	Pelatihan, Pembela jaran, Uji Kompetensi	2012-2016
7.	TNC (The Nature Conservancy)	Bentang Laut Lesser Sunda, Bentang Laut Kepala Burung, Berau (Derawan), Wakatobi, Laut Sawu, Raja Ampat	Kawasan Konservasi Perairan, Praktik Berkelanjutan, Perencanaan Ruang Laut, Pesisir Tangguh	2020

8.	WCS (Wildlife Conservation Society)	Aceh, TN Karimunjawa, TN Taka Bonerate, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat	Bimtek, Profil & Desain Jejaring KKP, RPZ-KKP, Pengembangan Prototipe Alternatif Mata Pencaharian, Penguatan Pokmaswas, TA terkait Perdagangan Illegal Biota Ikan yang dilindungi, Penyedia Data Informasi	2018
9.	Rare	Taman Nasional Karimun Jawa, Teluk Mayalibit, Betahwalang, Fish Forever 2014: KKPD Sabang, TWP Anambas, TN Kepulauan Seribu, TWP Gili Matra, TWP Teluk Bumbang, TN Bunaken, DPL Teluk Kolono, TN Wakatobi, TN Taka Bonerate, TWP Laut Banda, KKPD Kaimana	Kampanye Konservasi Laut & Perikanan	2015-2020

10.	DFW (<i>Destructive Fishing Watch</i>)	Pulau Kecil-Kecil Terluar (Sulsel, NTT, NTB, Kep Riau, Papuat Barat, Kaltim, Kaltura, Maluku, Sulut, Papua, SulTeng, Bengkulu, Lampung, Aceh,)	Pendampingan Masyarakat Pulau-pulau Kecil Terluar, Meningkatkan Kualitas Ekosistem Mangrove, Penyediaan Sarana Prasarana	2014-2017
11.	Reef Check Indonesia	Tersebar di seluruh Wilayah Indonesia	Survey Pemutihan Karang, Sistem Berbasis Web data nasional untuk pemutihan karang	

Dapat dilihat dari pembahasan diatas, bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia terdiri dari kerjasama dengan pemerintahan baik dengan negara anggota CTI CFF maupun negara mitra serta kerjasama dengan aktor lainnya seperti *Non-Governmental Organization*. Kerjasama yang dilakukan dimulai dari penyuluhan, pelatihan, hingga keterlibatan masyarakat mengenai kawasan konservasi yang di lakukan oleh Indonesia untuk melaksanakan mandate yang diamanahkan oleh CTI-CFF. Kerjasama ini tentunya memiliki kekuatan dan kelemahan di setiap sisinya. Akan tetapi, kerjasama ini membuktikan bahwa keseriusan masyarakat dari mulai pemerintah hingga grass root peduli akan masalah lingkungan yang ada, terutama masalah perairan.

Untuk itu, harapan kedepan dengan adanya kerjasama yang ada, kawasan segitiga terumbu karang dunia ini tetap lestari untuk keberlangsungan kehidupan mahluk laut baik berupa ikan, terumbu karang maupun makhluk biotik lainnya yang nantinya akan berdampak bagi kesejahteraan dan keseimbangan dunia.